

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu melindungi negara, mensejahterakan bangsa dan ikut mendukung ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan sebagai landasan dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Sebagai sebuah negara besar yang memiliki penduduk lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia tentu sangat memerlukan perlindungan militer untuk menghalau ancaman dari luar. Sebuah keadaan dunia yang sangat anarki mengharuskan sebuah negara harus mampu mengembangkan sistem pertahanan mereka sendiri demi melindungi kepentingan nasional mereka.

Indonesia secara *geopolitik* adalah negara yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudra. Wilayah Indonesia juga merupakan jalur pelayaran utama perdagangan dunia. Dua samudra yang mengapit Indonesia ini memiliki nilai strategis yang signifikan bagi kepentingan nasional, kawasan, maupun negara besar di sekitarnya.¹

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 5.219.270 km², memiliki 17.508 pulau dan sekitar 6000 pulau diantaranya adalah berpenghuni. Luas daratan sekitar 1.919.270 km² dikelilingi oleh sekitar 3.3 juta km² laut teritorial yang merupakan 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Jarak dari utara ke selatan adalah sekitar 1.770 km dan 5.152 km dari Timur ke Barat atau 1/8 dari keliling dunia²

Untuk menjadi negara dengan kekuatan militer yang disegani, Indonesia masih dalam proses transformasi. Alutsistanya sudah banyak yang usang. Alutsista dikutip dari peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk

¹ Sarjito, Aris. "EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE KOMPONEN UTAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT". Vol. 4 No. 2 Desember 2018 | 85

² ibid

pelaksanaan tugas pokok TNI. Dalam hal ini mencakup senjata pistol dan senapan, kendaraan tempur, munisi kaliber kecil maupun khusus, alat komunikasi, serta alat perang elektronika.³

Jumlah alutsista jika dibandingkan dengan luas ruang udara, perairan dan daratan relatif kecil. Singapura dengan wilayah daratan seluas 728,3 kilometer persegi mengoperasikan 40 F-15SG, 60 F-16 Blok 52, empat pesawat intai G550-AEW, enam *tanker* A330 MRTT, 96 tank Leopard 2SG, empat kapal selam dan enam *fregat*. Bandingkan dengan Indonesia dengan luas ruang udara 8,3 juta kilometer hanya mengoperasikan 33 F-16 lama, 16 Su-27/30, tanpa pesawat AEW&C, satu *tanker* C-130B Hercules, empat kapal selam dan tujuh *fregat*. Artinya, pertahanan Indonesia membutuhkan akuisisi alutsista secara masif dan disanalah muncul kebutuhan akan diplomasi pertahanan.

Diplomasi pertahanan dibutuhkan untuk membuka akses terhadap akuisisi alutsista berteknologi maju. Tidak saja sekedar mampu membeli, dibutuhkan pula perijinan dari pemerintah negara produsen alutsista. Dalam kasus tertentu, bahkan dibutuhkan juga ijin dari sejumlah negara lain yang terafiliasi dengan alutsista tersebut. Contohnya adalah F-35, yang merupakan pesawat tempur canggih bergenerasi lima yang sulit terdeteksi radar yang mampu mengusung empat rudal atau bom di dalam perutnya. Akuisisi F-35 membutuhkan ijin pemerintah AS dan juga urutan antrian dari negara-negara pembeli terdahulu F-35 yang akan membuat rencana akuisisi F-35 untuk TNI AU menghadapi kendala teknis. Kunjungan Prabowo ke AS pada bulan Oktober 2020 lalu telah menghasilkan sejumlah terobosan. Ada alutsista yang diupayakan Prabowo untuk dapat dibeli dari AS.

Sedangkan di Rusia, Prabowo menghadapi tantangan atas pengadaan alutsista yang sudah ditandatangani di era Ryamizard Ryacudu namun dalam pelaksanaannya menghadapi kendala politik. AS telah menetapkan undang-undang perlawanan terhadap musuh AS melalui sanksi (*Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* atau CAATSA) yang memberikan sanksi kepada sejumlah individu dan perusahaan dari Rusia, Iran, dan Korea Utara termasuk pihak-pihak yang bertransaksi dengan mereka. Prabowo memiliki harapan untuk mengupayakan kepada pemerintah AS memberikan dispensasi atas pemberakuan CAATSA dalam pengadaan alutsista asal Rusia kepada Indonesia. Hal tersebut terjadi di

³ Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 62 Tahun 2018

India, India tetap mengadakan suku cadang alutsista dari Rusianya seperti Su-30 MKI, MiG-29K, Il-78, MiG-21, Mi-35 dan lain sebagainya.

Dengan Jepang, dipahami bahwa Jepang berharap Indonesia lebih tegas dalam menentang aksi China di Laut China Selatan (LCS). Namun Prabowo tentu memahami bahwa tidak ada untungnya Indonesia terlalu tegas dalam sengketa di LCS seperti yang telah diulas sebelumnya di atas. Jepang, seperti Jerman, yang tidak leluasa mengembangkan teknologi persenjataannya tanpa diawasi AS, tidak memberikan proposisi sumber alutsista yang menarik bagi Indonesia, kecuali dalam alutsista matra laut. Jepang merupakan salah satu pemasok kapal komersial terbesar di dunia. Kerja sama industri pertahanan antara galangan kapal Jepang dan PT PAL (Persero) akan memiliki nilai strategis jika Jepang dapat membangun basis produksi kapal militer dan komersialnya di fasilitas PT PAL (Persero).

Sementara dengan Austria difokuskan pada rencana pengadaan pesawat Eurofighter Typhoon Trance 1 bekas. Prabowo melihat bahwa dalam proses akuisisi teknologi tidak dapat terjadi. Proses anggaran, pengadaan, dan produksi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Diperlukan adanya alutsista pengisi sementara (*interim*) sambil menunggu datangnya pesanan alutsista baru. Namun, pesawat yang rencananya dibeli dari Austria tersebut diberitakan mengandung polemik di dalam Austria dan pabrikannya yang belum tuntas penyelesaiannya.

Dengan Perancis, Prabowo melihat sejumlah peluang kerja sama yang bukan saja dari aspek teknologi, melainkan terutama dari aspek pembiayaan. Kedua negara memiliki lembaga keuangan yang tertarik berinvestasi dalam membiayai pengadaan alutsista untuk Indonesia senilai dengan kebutuhan pengadaan alutsista hingga beberapa periode rencana strategis ke depan. Sehingga tidak heran jika Prabowo sempat tertarik kepada alutsista asal negeri Menara Eiffel tersebut seperti pesawat tempur Rafale dan kapal selam Scorpene. Sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi pertahanannya ke Perancis adalah untuk mendapatkan tujuan ekonomi pertahanan, berupa dukungan pinjaman.

Terkait akuisisi teknologi modern, Prabowo baru saja menghandiri acara peluncuran pesawat KF-21 Boramae di Kota Sacheon (Korea Selatan) yang merupakan hasil kolaborasi

Korean Aerospace Industries (KAI), PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan sejumlah mitra industri lainnya. KF-21 digadang sebagai pesawat tempur generasi 4, walaupun dari segi penampilan sudah menyerupai pesawat tempur generasi 5, seperti F-35 AS dan J-31 Cina. Teknologi kunci pada KF-21 tidak semuanya dapat diakuisisi oleh industri nasional Indonesia, dikarena faktor politik yang membedakan tingkat kedekatan Indonesia dan Korea Selatan terhadap Amerika Serikat.

Sejumlah teknologi kunci yang tidak berhasil didapat dari AS untuk Indonesia diduga seperti Radar *Active Electronic Scanned Array* (AESA), sensor *pasif infrared and Tracking System* (IRST) dan Sistem Pengelohan Data (*Mission System*) berkecepatan tinggi yang memudahkan pilot dalam operasi militer. Tanpa sistem di atas, maka penguasaan teknologi Indonesia akan terus tertinggal dan bergantung kepada negara maju. Diperlukan diplomasi total dalam mendukung kepentingan di sektor pertahanan Indonesia. Sehingga motonya yang paling pas untuk konteks Indonesia hari ini adalah diplomasi untuk pertahanan, dan bukan pertahanan untuk diplomasi.⁴

Oleh sebab itu, penguatan militer dengan tujuan keselamatan negara adalah mutlak adanya. Pemerintah mencermati hal ini dengan membangun sebuah kebijakan terpadu yang bertujuan untuk melengkapi sebuah kekuatan pokok minimum militer Indonesia. Kebijakan tersebut dinamakan *Minimum Essential Force* (MEF). *Minimum Essential Force* merupakan amanat nasional bidang pertahanan keamanan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2009 telah dirumuskan *Strategic Defence Review* (SDR) dan ditetapkan pokok-pokok pikiran serta direkomendasikan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan suatu kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2010 sebagai bagian dari postur ideal pertahanan negara. MEF merupakan strategi pembangunan kekuatan Komponen Utama menuju ideal dan MEF tidak diarahkan pada konsep perlombaan senjata/*arm race* maupun sebagai strategi pembangunan kekuatan untuk memenangkan perang total, akan tetapi sebagai suatu betuk kekuatan pokok yang memenuhi sandar tertentu serta memiliki efek tangkal. Pembangunan MEF diselaraskan dengan sumber daya yang

⁴ Ariscynatha, putra. "Quid Enim : Diplomasi Pertahanan Indonesia". <https://www.gatra.com/news-512399-info-kemenhan-kolom-opini-quid-enim-diplomasi-pertahanan-indonesia.html>. 2021

terbatas dengan merevitalisasi industri pertahanan, namun diharapkan tetap mampu mengatasi ancaman aktual sebagai skala prioritas tanpa mengesampingkan ancaman potensial dalam kerangka TNI mampu melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di samping itu guna mewujudkan strategi penangkalan.

Pada tahun 2020, Indonesia menempati urutan nomor 16 dari 138 negara kekuatan militer dunia berdasarkan pada laman *Global Fire Power* dengan indeks kekuatan 0,2544 (dari nilai sempurna 0,0000). Secara global peringkat pertama ditempati oleh Amerika Serikat 0,0606, disusul Rusia 0,0681 dan China 0,0691. Sedangkan di Asia Tenggara Indonesia memiliki kekuatan militer terbesar di kawasan berdasarkan laman *Global Fire Power*. Posisi kedua di Asia Tenggara ditempati oleh Vietnam 0,3559, lalu Thailand 0,3571. Malaysia di posisi 44 dunia dengan skor 0,6546, lalu Singapura di peringkat 51 dunia 0,7966.⁵

Kekuatan militer sebuah negara, berdasarkan pemeringkatan *Global Fire Power* dapat dilihat dari delapan unsur pembentukannya, yakni sumber daya manusia, kekuatan udara, kekuatan darat, kekuatan laut, sumber daya alam, logistik, keuangan, dan geografi. Alat utama sistem senjata merupakan salah satu pembentuk kekuatan tersebut, baik alutsista kekuatan militer darat, udara, maupun laut.⁶ Namun, apakah penilaian yang luar biasa tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur kemampuan militer suatu negara secara mutlak? Setelah ditelusuri, ditemukan bahwa pada pemeringkatan *Global Fire Power* hanya mementingkan kuantitas alutsista yang dimiliki. Sehingga 1 tank Leopard akan disamakan kualitasnya dengan 1 tank AMX.

Kebangkitan China dan hegemoni Amerika, khususnya di kawasan Asia Tenggara juga menghadirkan kondisi baru pada pergerakan dunia saat ini. Kebangkitan China memberikan sinyal akan (atau sedang) adanya perubahan dalam keseimbangan kekuatan baru dalam hubungan internasional. *Unipolar system* yang selama ini dikomandoi oleh Amerika, khususnya di Asia Tenggara, “terancam” dengan kehadiran China di kawasan ini. Sedangkan kebijakan US *pivot to Asia* yang digencarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama memberikan sinyal bahwa Asia merupakan kawasan penting bagi Amerika dan terdapat kepentingan nasionalnya di kawasan ini. Beberapa pakar bahkan mendiskusikan

⁵ <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>. 2021

⁶ ibid

adanya kemungkinan persaingan yang akan diakhiri dengan perang atau konflik militer di abad 21.⁷

Luas permukaan wilayah kedaulatan nasional NKRI kini bahkan lebih banyak terdiri atas air (75%) ketimbang daratan. Sungguh mengherankan mengapa kenyataan (aset) geostrategis tersebut sampai sekarang tidak diakui secara eksplisit oleh para petinggi kita di kementerian pertahanan dan keamanan. Maka, sudah saatnya kita merumuskan suatu “strategi maritim” yang mengacu ke arah pembentukan suatu kekuatan laut (*sea power*) bagi arsipelago Indonesia, demi menjamin sekuriti tanah air. Selaku negara bangsa maritim adalah wajar sekali bila kita merumuskan satu strategi maritim. Dalam berbuat begitu kita sebenarnya membangkitkan batang terendam. Usaha ini perlu dilakukan secara konsisiten dan kontinu sebab sebagaimana ditulis oleh admiral Cunningham dalam memorinya “*it takes a navy three years to build a ship, but takes a nation three hundred years to build a tradition*”.⁸

Usaha ini diwujudkan dengan rencanan pembangunan kekuatan militer Indonesia dalam jangka 5 tahunan yang dilakukan secara kontinu dalam kerangka kebijakan *Minimum Essential Force* sebagai upaya pemenuhan minimal standar kekuatan militer yang diperlukan untuk melindungi seluruh wilayah tanah air Indoonesia. MEF ini sendiri memiliki tiga komponen utama dalam perumusannya yang pertama adalah, *capability-based planning* di mana dalam pemenuhan kapabilitas pertahanan negara perlu menyadari kapabilitas yang dimiliki pada saat ini hal ini utamanya ditujukan pada keterbatasan anggran dan optimalisasi anggaran tersebut untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara.⁹

Dalam lampiran kebijakan penyelarasan *Minimum Essential Force* komponen utama disebutkan beberapa resiko yang dapat diterima Indonesia apabila MEF tidak terpenuhi, adapun kemungkinan resiko tersebut adalah :

a. Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI semakin besar dan berdampak pada stabilitas nasional

⁷ Saragih. “DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN”. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VIII No. 1/Juni 2018

⁸ Joesoef, Daud. “Studi Strategi logika ketahanan dan pembangunan nasional”. Jakarta. 2014

⁹ Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap MEF di Kemhan | Iskandar, Wibisono, Supandi hall 55

- b. Tidak tercapainya program pembangunan nasional bidang pertahanan negara
- c. Posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah Indonesia dalam diplomasi internasional melemah dan kurang diperhitungkan oleh masyarakat internasional.
- d. Tidak terpenuhinya pembangunan MEF komponen utama mengakibatkan menurunnya daya tangkal (*deterrence*) pertahanan negara di kawasan.
- e. Menurunnya posisi daya saing bangsa (*competitive index*) di lingkungan internasional
- f. Berkurangnya kemampuan TNI didalam melaksanakan tugas pokoknya.

Mengingat faktor resiko yang dapat berdampak vital terhadap Indonesia maka MEF merupakan hal yang signifikan untuk dipenuhi. Oleh karena itu di dalam rangka pemenuhan MEF instrumen diplomasi diperlukan untuk mendukung realisasi kebijakan tersebut.¹⁰

1.2. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

¹⁰ Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap MEF di Kemhan | Iskandar, Wibisono, Supandi hall 56

- a. Bagaimana kondisi pertahanan Indonesia saat ini dilihat dari kepemilikan alutista dan faktor-faktor pendukungnya?
- b. Apa ancaman terdekat yang berpotensi mengancam keutuhan negara dari segi agresi militer?
- c. Bagaimana kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia dalam pemenuhan alutista untuk memenuhi *Minimum Essential Force* tahap dua dan tiga tahun 2015-2021

B. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian skripsi supaya tetap fokus, maka penelitian skripsi ini dibatasi pada apa diplomasi pertahanan yang dilakukan sebagai upaya penguatan angkatan laut dan udara dalam kerangka kebijakan *Minimum Essential Force* tahap dua dan tiga tahun 2015-2021.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian skripsi ini adalah “apa diplomasi pertahanan yang dilakukan sebagai upaya penguatan angkatan laut dan udara dalam kerangka kebijakan minimum essential force tahap dua dan tiga tahun 2015-2021”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi pertahanan militer Indonesia pada saat ini
2. Mengetahui ancaman potensial yang membayangi Indonesia pada saat ini
3. Mengetahui diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia sebagai upaya penguatan angkatan laut dan udara dalam kerangka kebijakan *Minimum Essential Force* tahap dua dan tiga tahun 2015-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran baik secara teori maupun praktek di bidang hubungan internasional, khususnya studi keamanan. Semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman yang tertarik akan dunia perpolitikan dan keamanan militer di kancah internasional.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini menjadi bukti hasil karya yang telah dididik dan dibimbing selama proses pembelajaran di kampus, serta menambah koleksi literatur sebagai bahan diskusi dan belajar.